BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan data penelitian tentang Kontribusi kemampuan manajerial kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan manajerial kepala sekolah berkorelasi positif dengan tingkat korelasi sebesasr 0,986 artinya terdapat kontribusi yang sangat kuat dari variabel kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS sebesar 98,6 %. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien jalur (ρ_{y1}) = 0,957 dan r_{1y} = 0,903 maka $\rho_{y1} > r_{1y}$, hal ini berarti efektivitas implementasi MBS disebabkan secara langsung oleh kemampuan manajerial kepala sekolah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja komite sekolah berkorelasi positif dengan tingkat korelasi sebesasr 0,973 artinya terdapat kontribusi yang sangat kuat dari variabel kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS sebesar 97,3%. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien jalur (ρ_{y1}) = 0,833dan r_{1y} = 0,766 maka $\rho_{y1} > r_{1y}$, hal ini berarti efektivitas implementasi MBS disebabkan secara langsung oleh kinerja komite sekolah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi kemampuan manajerial kepala sekolah dan kinerja komite sekolah secara bersama-sama terhadap efektivitas implementasi MBS sebesar 0,766 atau memiliki kontribusi sebesar 76,7%. Berdasarkan acuan koefisien determinasi termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kontribusi dari variabel kemampuan manajerial kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini didasarkan atas kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya tentang Kontribusi kemampuan manajerial kepala sekolah dan kinerja komite sekolah terhadap efektivitas imlementasi MBS adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan MBS secara konsekuen

   Implementasi MBS dimaksudkan untuk memberdayakan potensi organisasi (sekolah) yang beragam dalam mencapai tujuan. Untuk itu kepala sekolah perlu menerapkan manajemen stratejik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan otonomi sekolah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, relevansi dan mutu pelayanan pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia.

2. Meningkatkan kemampuan manajerial bagi kepala sekolah

   Hal ini sangat penting bagi kepala sekolah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai manajer berdasarkan kekuasaan dan kewenangan

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERPUSTAKAAN

yang diberikan. Tanpa kemampuan manajerial yang memadai MBS tidak dapat dilaksanakan secara benar dan optimal.

3. Meningkatkan kinerja komite sekolah

Implementasi MBS sangat dipengaruhi oleh kinerja komite sekolah, karena keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah dipicu peningkatan partisipasi masyarakat (komite sekolah) terhadap perkembangan pendidikan di sekolah. Lemahnya kinerja komite sekolah menyebabkan terputusnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Kondisi ini berarti implementasi MBS tidak efektif, sehingga mutu pendidikan tidak tercapai.

C. Rekomendasi

Berdasarkan analisis penelitian tentang Kontribusi Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah terhadap Efektivitas Implementasi MBS, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Kepala Sekolah pada SD Negeri *Pilot Project* MBS

Pengelolaan hubungan sekolah–masyarakat dapat dilakukan dengan cara menambah volume dialog terhadap masyarakat untuk mengetahui keinginan mereka terhadap sekolah Hasilnya dipergunakan dalam rangka pengembangan rencana strategis sekolah. Fattah (2003 : 26) menyatakan bahwa "Rencana sekolah adalah membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan waktu mendatang, mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat". Mulyasa (2004 : 50) berpendapat bahwa Menjalin

hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat terutama orangtua mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan dilakasanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan".

2. Pihak Komite Sekolah

   a. Pengurus komite sekolah sebagai badan penghubung antara sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat (Nurkholis, 2002). Untuk itu pengurus komite sekolah perlu melakukan dialog dengan orang tua siswa beserta warga sekolah lainnya sebagai langkah awal pengkajian ulang berbagai keinginan masyarakat untuk pendidikan anaknya serta menampung permasalahan sekolah dalam rangka peningkatan kinerja sekolah, selanjutnya dicari pemecahannya secara bersama.

   b. Pengurus komite sekolah perlu mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan berbasis sekolah serta kemungkinan dampak dari faktor-faktor tersebut, untuk kemudian sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam penyusunan rencana sekolah.

   c. Pengurus komite sekolah perlu melakukan studi kelayakan pada sekolah-sekolah unggulan, selanjutnya diterapkan setelah melalui penyesuaian terhadap faktor budaya, geografis, dll.

3. Pemerintah Daerah

a. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui Tim Pengawas MBS dapat menjadi perantara apabila diperlukan dalam mengatasi komunikasi yang kurang baik antara kepala sekolah dan komite sekolah.

b. Peran serta tim Dinas Pendidikan masih terlihat kurang mendukung penerapan MBS. Seringkali anggota tim bukan sebagai pendukung dari belakang atas pelaksanaan MBS tetapi masih ingin tampil di depan. Peran yang demikian justeru menghambat penerapan MBS dalam rangka terjadinya efektivitas sekolah dan peningkatan mutu pendidikan secara umum.

c. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat perlu menyusun strategi yang sifatnya berupa rambu-rambu dalam membimbing sekolah yang menerapkan MBS, sebab starategi pada masing-masing daerah tidak sama tergantung pada politik , ekonomi, dan budaya daerah masing-masing. Bahkan strategi masing-masing sekolah tidak harus sama.

Saran dari peneliti untuk strategi tersebut adalah :

1) Penerapan MBS dengan strategi *Pilot Project* di Kabupaten Lahat sudah tepat mengingat faktor demografi dan budaya di Kabupaten Lahat sangat beragam serta kemampuan kepala sekolah tidak sama. Namun yang perlu diperhatikan model uji coba harus memenuhi persyaratan dasar yaitu : dapat di terima masyarakat

(akseptibilitas), dapat dipertanggung jawabkan baik secara konsep operasional maupun dana (akuntabilitas), dapat di replika oleh sekolah lain (replikabilitas), program tersebut dapat dikembangkan meskipun uji coba sudah selesai (sustainibilitas)

2) Penerapan MBS pada masing-masing sekolah tidak dapat disamakan. Untuk itu sebelum menetapkan sekolah perlu dilakukan pendataan terhadap persyaratan sekolah, sehingga tim kabupaten dapat menentukan tingkatan sekolah dalam MBS. Fattah (2004) menyatakan bahwa ada lima persyaratan yanga harus dipenuhi dalam penerapan MBS, yaitu :

- Pemilihan kepala sekolah dan guru
- Bentuk partisipasi masyarakat
- Lokasi/kemampuan dasar sekolah
- Kemampuan pengadaan dana
- Nilai NEM

3) Peran serta orang tua siswa hal ini kinerja komite sekolah masih kurang, sehingga jajaran Dinas Pendidikan terutama kepala sekolah harus lebih aktif memotivasi agar masyarakat berperan aktif bukan hanya dalam pendanaan sekolah tetapi juga dalam proses pembelajaran.

4) Partisipasi orang tua siswa masih harus diarahkan untuk memikirkan kemajuan sekolah secara umum dan terutama dalam peniongkatan mutu sekolah. Orang tua harus lebih berperan aktif

dalam mengembangkan program sekolah serta lebih aktif dalam membimbing belajar anaknya di rumah.

5) Peran serta tim Dinas Pendidikan masih terlihat kurang mendukung penerapan MBS. Seringkali anggota tim bukan sebagai pendukung dari belakang atas pelaksanaan MBS tetapi masih ingin tampil di depan. Peran yang demikian justeru menghambat penerapan MBS dalam rangka terjadinya efektivitas sekolah dan peningkatan mutu pendidikan secara umum.

6) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat perlu menyusun strategi yang sifatnya berupa rambu-rambu dalam membimbing sekolah yang menerapkan MBS, sebab starategi pada masing-masing daerah tidak sama tergantung pada politik , ekonomi, dan budaya daerah masing-masing. Bahkan strategi masing-masing sekolah tidak harus sama.

7) Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah peningkatan belajar siswa, sebab MBS tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu. Oleh karena itu, usaha MBS harus lebih terfokus pada pencapaian prestasi belajar siswa.

8) Dinas Pendidikan harus selektif dalam mengeluarkan peraturan-peraturan atau petunjuk pelaksanaan, sebab hal tersebut dapat mengekang dan membelenggu sekolah.

9) Pemerintah daerah perlu mengalokasikan bantuan khusus pada sekolah pilot project. Bantuan tersebut digunakan untuk kesejahteraan guru dan staf yang diberikan sebagai reward.